



PERAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION AND PKN IN BUILDING AWARENESS OF TOLERANCE AMONG RELIGIOUS CONGREGATIONS

Tongku Hasonangan^{1*}, Syamzaimar²

^{1*}Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Email: tongkunasution03011@gmail.com

²Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Email: syamzaimar0774@gmail.com

*email koresponden: tongkunasution03011@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2507>

Abstrack

Education plays a strategic and irreplaceable role in shaping individuals who are tolerant, open-minded, and fully capable of living harmoniously within a diverse society. In a nation as pluralistic as Indonesia — home to hundreds of ethnic groups, over 700 regional languages, and six officially recognized religions — fostering interfaith tolerance is not merely an educational goal but a national imperative. Religious education (Pendidikan Agama Islam/PAI) and Civic Education (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/PKN) represent two essential and complementary pillars in this endeavor. Religious education functions not solely to strengthen faith and ritual practice but critically to instill universal values such as compassion (rahmah), mutual respect (ihtiram), justice ('adalah), and the ethic of peaceful coexistence (tasamuh) among diverse religious communities. This foundation is anchored in the Islamic concept of rahmatan lil 'alamin — mercy for all of creation — which provides robust theological grounding for building a tolerant and inclusive character. Simultaneously, Civic Education (PKN) emphasizes national values, democratic principles, human rights, and deep respect for diversity as constitutive elements of Indonesia's civic and constitutional identity. Through the systematic integration of these values into the learning process, particularly through dialogical, reflective, project-based, and experiential pedagogies, students are expected to develop genuinely inclusive attitudes, to value and celebrate differences, and to actively reject all forms of discrimination, prejudice, and intolerance. However, integration in practice faces multiple challenges including teacher capacity, curriculum coherence, and digital counter-narratives. This study, employing a systematic literature review methodology, identifies three effective models of PAI-PKN integration: (1) Thematic Cross-Subject Learning, (2) Collaborative Social Projects, and (3) Theological-Civic Reflection. The findings affirm that the synergy between religious education and Civic Education is fundamental to building sustainable tolerance awareness in a pluralistic Indonesian society.

Keywords: religious education, civic education, tolerance, diversity, character development, Indonesia, Pancasila.



Abstrak

Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersama dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, toleransi, keberagaman, pengembangan karakter, Indonesia, Pancasila, kelompok Kelas, Kelas Unggulan, Kelas Non Unggulan, Prestasi Belajar, Siswa SMP.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang luar biasa tinggi, mencakup lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan digunakan, serta enam agama yang diakui secara resmi oleh negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemajemukan yang demikian kaya ini merupakan anugerah historis dan kultural yang tak ternilai, sekaligus menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi dan disrupsi digital yang terus bergerak cepat ini. Meski Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan fondasi konstitusional yang kuat bagi kerukunan dan persatuan, kenyataan empiris di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terhadap kohesi sosial masih terus hadir dalam berbagai bentuknya (Riyadi dkk., t.t.).

Data Setara Institute (2023) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi 175 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang melibatkan 235 tindakan konkret. Konflik-konflik horizontal berbasis agama dan etnis yang pernah terjadi di Ambon, Poso, dan beberapa daerah lain di masa lalu telah meninggalkan luka sosial yang mendalam dan menjadi pengingat betapa rentannya persaudaraan bangsa jika tidak dirawat



dengan sungguh-sungguh. Lebih dari itu, meningkatnya radikalisme berbasis agama, ujaran kebencian di media sosial, serta segregasi sosial antar kelompok menjadi ancaman nyata yang memerlukan respons komprehensif dari berbagai sektor, termasuk — dan terutama — sektor pendidikan.

Pendidikan diyakini secara luas sebagai instrumen paling strategis dan paling berkelanjutan dalam membentuk karakter toleran pada generasi muda bangsa. Di antara berbagai mata pelajaran dalam kurikulum nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki relevansi paling langsung dan paling kuat dengan pembentukan sikap toleransi dan moderasi beragama. PAI tidak sekadar mengajarkan aspek ritual, ibadah, dan hafalan, tetapi pada intinya merupakan pendidikan pembentukan karakter dan akhlak yang komprehensif. Dalam perspektif Islam, konsep rahmatan lil 'alamin — bahwa Islam dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam dan seluruh manusia tanpa terkecuali — menjadi landasan teologis yang paling kokoh bagi pembangunan sikap toleran, inklusif, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk (Patih dkk., t.t.).

Sementara itu, PKn secara eksplisit bertugas membentuk warga negara yang demokratis, sadar hak dan kewajiban, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar identitas kebangsaan Indonesia. Melalui pembelajaran PKn yang transformatif, peserta didik diajak untuk bukan hanya memahami keberagaman secara kognitif, tetapi juga menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang baik (Widiyanto dan Istiqomah 2023).

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji secara terpisah kontribusi PAI maupun PKn dalam membentuk sikap toleransi, kajian yang mengintegrasikan secara komprehensif dan mendalam sinergi di antara keduanya masih sangat terbatas dalam literatur pendidikan Indonesia. Celah inilah yang hendak dijawab oleh artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara mendalam bagaimana nilai-nilai toleransi diimplementasikan dalam kurikulum PAI dan PKn berdasarkan Kurikulum Merdeka; kedua, mengidentifikasi model-model integrasi PAI dan PKn yang terbukti efektif dalam membangun kesadaran toleransi; ketiga mengkaji tantangan-tantangan sistemik yang dihadapi dalam implementasinya; dan keempat, merumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan toleransi di Indonesia (Rosyad dan Khoiriyah 2025).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pendidikan Islam dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam diskursus tentang integrasi kurikulum berbasis nilai. Secara praktis, temuan dan rekomendasi penelitian ini diharapkan menjadi panduan yang berguna bagi guru, kepala sekolah, pengembang kurikulum, dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran toleransi yang lebih efektif, kontekstual, dan berdampak.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan sistematis (systematic literature review/SLR). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis yang kuat: pertama, luasnya cakupan topik yang melibatkan dua bidang studi berbeda (PAI dan PKn) yang keduanya memiliki korpus literatur yang sangat luas; kedua, kebutuhan untuk melakukan sintesis lintas-penelitian guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dan representatif; dan ketiga, tujuan penelitian yang bersifat teoritis-analitik, yakni membangun kerangka konseptual integrasi PAI-PKn yang didukung oleh bukti empiris dari berbagai konteks.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal ilmiah peer-reviewed yang terindeks dalam basis data bereputasi internasional (Scopus, Web of Science, DOAJ) dan nasional (Sinta 1 dan Sinta 2) yang diterbitkan dalam rentang tahun 2018-2024. Peneliti juga menggunakan Google Scholar sebagai basis data tambahan untuk menangkap penelitian-penelitian yang mungkin terlewat dari basis data utama. Selain artikel jurnal, sumber data sekunder meliputi: buku-buku akademik yang relevan, dokumen kebijakan pendidikan nasional (Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Permendikbudristek), regulasi dan panduan moderasi beragama dari Kementerian Agama RI, serta laporan-laporan lembaga riset terpercaya seperti Setara Institute dan PPIM UIN Jakarta.

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari empat tahap: pertama, Identifikasi: penelusuran literatur menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Inggris meliputi "pendidikan agama Islam", "pendidikan kewarganegaraan", "toleransi beragama", "moderasi beragama", "Islamic religious education", "civic education", "religious tolerance", "Indonesia", menghasilkan 347 referensi potensial; kedua, Skrining: berdasarkan judul dan abstrak, 198 referensi dikeluarkan karena tidak relevan, tersisa 149 referensi; ketiga, Kelayakan: pembacaan teks lengkap menyaring 56 referensi tambahan karena tidak memenuhi kriteria metodologis, tersisa 93 referensi; dan keempat, Inklusi: setelah verifikasi akhir, sebanyak 85 referensi ditetapkan sebagai sumber data final yang dianalisis secara mendalam.

Kriteria inklusi yang diterapkan secara ketat meliputi: relevansi topik yang jelas dengan PAI, PKn, dan/atau toleransi beragama; diterbitkan oleh jurnal atau penerbit bereputasi dan terverifikasi; menggunakan metodologi penelitian yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; menyajikan temuan yang orisinal dan memberikan kontribusi nyata pada pemahaman tentang topik yang dikaji. Kriteria eksklusi meliputi: artikel opini tanpa basis data empiris atau analisis teoritis yang substansial, artikel yang duplikat atau redundan, serta sumber dari website atau blog yang tidak terverifikasi.

Analisis data dilakukan menggunakan dua teknik yang saling melengkapi: analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi frekuensi dan distribusi tema-tema tertentu, dan analisis tematik (thematic analysis) mengikuti kerangka Braun dan Clarke (2006) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang muncul dari data. Proses analisis tematik mencakup enam fase: familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian



tema, perevisuan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Validitas dan kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber (menggunakan berbagai jenis sumber data), triangulasi teori (menerapkan beberapa kerangka teori yang berbeda), dan konfirmasi dari dua pakar di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Teologis dan Konseptual Toleransi dalam PAI

Sebelum membahas implementasi, penting untuk meletakkan landasan konseptual yang kokoh. Toleransi dalam perspektif Islam bukan merupakan konsesi yang terpaksa diberikan kepada kelompok lain, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep tasamuh (toleransi) dalam fikih Islam merujuk pada sikap lapang dada, menghargai, dan memberi ruang bagi perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah yang fundamental (Amar 2021).

Al-Qur'an secara eksplisit mengakui dan menghormati keberagaman sebagai kehendak dan sunnatullah (hukum alam Tuhan). Prinsip "lakum dinukum waliyadin" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku, QS. Al-Kafirun: 6) menegaskan batas-batas yang jelas antara domain keyakinan teologis yang bersifat personal dan domain kehidupan sosial yang bersifat komunal. Sementara itu, perintah ta'aruf (saling mengenal dan memahami antar manusia yang berbeda) dalam QS. Al-Hujurat: 13 merupakan dasar Qur'ani bagi pembangunan dialog dan harmoni sosial lintas agama dan budaya. Konsep-konsep ini, jika diajarkan dengan tepat dan kontekstual, memberikan fondasi teologis yang sangat kuat bagi pendidikan toleransi yang autentik dari dalam tradisi Islam itu sendiri (Sukandarman Sukandarman dan Ainur Rofiq Sofa 2024).

Dalam konteks Indonesia, prinsip Islam rahmatan lil 'alamin dan konsep moderasi beragama (wasatiyyah) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI menjadi kerangka operasional yang menghubungkan nilai-nilai teologis Islam dengan konteks kehidupan berbangsa yang pluralistik. Moderasi beragama — yang mencakup empat indikator utama: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, toleransi, dan akomodasi budaya lokal — telah diadopsi sebagai orientasi resmi pendidikan agama Islam di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 (Chrisantina 2021).

b. Implementasi Nilai Toleransi dalam Kurikulum PAI Kurikulum Merdeka

Analisis mendalam terhadap dokumen Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) mata pelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama telah diintegrasikan secara lebih sistematis, eksplisit, dan holistik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Terdapat setidaknya 14 poin kompetensi yang secara langsung atau tidak langsung menyebutkan kemampuan peserta didik untuk bersikap toleran, moderat, dan menghargai keberagaman dalam konteks kehidupan sosial yang nyata (Hanafie dkk. 2024)

Materi-materi inti yang mendukung pembentukan sikap toleransi dalam PAI mencakup:
(a) Materi akhlak terhadap sesama manusia (muamalah) yang menekankan hak-hak dan



kewajiban dalam hubungan antar manusia lintas identitas; (b) Kisah-kisah teladan Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi secara adil, manusiawi, dan bermartabat dengan non-Muslim di Madinah yang majemuk; (c) Studi tentang Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) sebagai model awal perjanjian sosial lintas agama dan suku bangsa; (d) Konsep-konsep kunci seperti ta'aruf (saling mengenal), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan dan moderasi), dan tawassuth (jalan tengah); dan (e) Kajian tentang sejarah peradaban Islam yang kaya dengan contoh-contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dibangun di atas fondasi inklusivitas dan penghargaan terhadap kebijaksanaan dari berbagai tradisi (Purnomo dan Solikhah 2021)

Penelitian (Yani dkk. 2023) yang menginvestigasi dampak pendekatan dialogis dalam PAI di 32 sekolah menengah di tujuh provinsi menemukan bahwa pembelajaran PAI yang menggunakan pendekatan dialogis, inkuiri kritis, dan berbasis pengalaman nyata secara konsisten menghasilkan peningkatan skor toleransi peserta didik yang jauh lebih signifikan — rata-rata 34,7% lebih tinggi — dibandingkan pendekatan ceramah konvensional yang bersifat satu arah dan doktriner. Temuan ini mempertegas argumen bahwa metodologi pembelajaran dan kualitas hubungan guru-murid dalam PAI, bukan sekadar substansi materi dalam buku teks, adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai toleransi pada diri peserta didik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Huda 2021) menemukan bahwa pengintegrasian literasi digital dalam pembelajaran PAI — khususnya kemampuan kritis untuk mengevaluasi, memverifikasi, dan merespons konten keagamaan di media sosial — secara signifikan meningkatkan ketahanan peserta didik terhadap narasi-narasi ekstremis dan intoleran yang marak beredar di ruang digital. Ini menunjukkan bahwa PAI di era digital perlu memperluas cakupannya untuk mencakup dimensi literasi digital yang berbasis nilai toleransi (Rabbani dkk., t.t.)

c. Peran PKn dalam Pembentukan Identitas Warga Negara yang Toleran dan Demokratis

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keistimewaan unik dan tanggung jawab khusus dibandingkan mata pelajaran lain dalam kurikulum nasional: secara eksplisit dan langsung bertugas membentuk identitas kewarganegaraan (civic identity) peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila. Identitas kewarganegaraan yang kuat, inklusif, dan berbasis nilai-nilai konstitusional merupakan fondasi psikologis dan sosial yang sangat penting bagi tumbuhnya sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kemampuan hidup berdampingan secara produktif

Pembelajaran PKn yang dirancang dan dilaksanakan berbasis pada analisis kasus-kasus konflik nyata dan proses rekonsiliasi dalam sejarah dan konteks kontemporer Indonesia terbukti mampu mengembangkan empati, pemahaman lintas-budaya, dan kemampuan perspektif-taking (perspective-taking) di kalangan peserta didik secara lebih efektif. Ketika peserta didik secara kritis mempelajari bagaimana berbagai konflik sosial yang kompleks — seperti konflik Maluku 1999-2002 atau kekerasan antar-komunitas di Kalimantan — dapat diselesaikan melalui dialog yang tulus, mediasi yang adil, dan rekonsiliasi yang berkelanjutan,



mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan historis yang penting, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, empati sosial, dan kemampuan untuk memahami realitas dari berbagai sudut pandang yang berbeda

(Widodo dan Yandi 2022) dalam kajian komprehensifnya tentang penguatan profil pelajar Pancasila menegaskan bahwa dimensi "berkebhinekaan global" dalam Profil Pelajar Pancasila — yang menjadi ruh kurikuler Kurikulum Merdeka — secara konseptual dan operasional sangat bergantung pada kualitas pembelajaran PKn yang mampu mengembangkan kesadaran identitas lokal-nasional-global secara simultan. Praktik demokrasi di ruang kelas, seperti diskusi kelompok yang terstruktur, debat akademik yang santun dan berbasis argumen, musyawarah mufakat, dan simulasi sidang legislatif, merupakan strategi pembelajaran PKn yang terbukti efektif dalam membentuk disposisi demokratis dan toleran pada peserta didik. Melalui praktik-praktik pembelajaran aktif dan partisipatif ini, peserta didik secara langsung berlatih menghargai pendapat yang berbeda, bernegosiasi dengan cara yang bermartabat, berkompromi untuk kepentingan bersama, dan mencari solusi konstruktif atas perbedaan-perbedaan yang ada

Penelitian (Hidayat dkk. 2023), dalam sebuah meta-analisis mencakup 47 penelitian tentang sinergi PAI dan PKn yang diterbitkan antara 2018 dan 2023, menemukan bahwa sekolah-sekolah yang mengimplementasikan pembelajaran PKn yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan — terutama di sekolah-sekolah Islam terpadu (SIT) dan madrasah — secara konsisten menghasilkan peserta didik dengan skor toleransi, empati sosial, dan kematangan demokratis yang lebih tinggi secara statistis dibandingkan sekolah-sekolah yang menerapkan kedua mata pelajaran tersebut secara terpisah dan tidak terkoordinasi.

d. Model Integrasi PAI dan PKn dalam Pembelajaran Toleransi: Temuan Lapangan

Berdasarkan sintesis mendalam terhadap 85 referensi yang menjadi sumber data penelitian ini, ditambah analisis terhadap berbagai praktik baik (best practices) yang terdokumentasi dengan baik dari sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi tiga model integrasi PAI dan PKn yang paling efektif dan paling layak diimplementasikan secara luas dalam membangun kesadaran toleransi pada peserta didik. Ketiga model ini bukan bersifat mutually exclusive — satu sama lain saling melengkapi — dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks, kondisi, dan sumber daya sekolah masing-masing

Model pertama adalah Model Tematik Lintas Pelajaran (Thematic Cross-Subject Integration). Model ini menggabungkan tema-tema toleransi, keberagaman, dan moderasi beragama yang dibahas secara bersamaan dan terkoordinasi dalam jadwal pembelajaran PAI dan PKn, menggunakan pendekatan dan perspektif yang saling melengkapi dan memperkuat. Guru PAI dan guru PKn secara kolaboratif merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terpadu, memastikan konsistensi dan koherensi pesan toleransi yang disampaikan kepada peserta didik dari dua perspektif yang berbeda namun saling memperkuat: perspektif teologis-religius dari PAI dan perspektif konstitusional-demokratis dari PKn. Contoh konkret implementasi model ini adalah unit pembelajaran bersama tentang "Kebhinekaan sebagai Rahmat: Perspektif Islam dan Pancasila" yang mengintegrasikan konsep Bhinneka Tunggal Ika dari PKn dengan konsep rahmatan lil 'alamin dari PAI.



Model kedua adalah Model Proyek Sosial Kolaboratif (Collaborative Social Project). Model ini mengajak dan memotivasi peserta didik untuk mengerjakan proyek-proyek sosial nyata yang bermakna bersama-sama, proyek-proyek yang dirancang untuk secara langsung melibatkan interaksi autentik dengan komunitas yang berbeda agama, etnis, dan latar belakang budaya. Proyek-proyek ini dapat berupa: kunjungan studi ke tempat ibadah berbagai agama yang diikuti dengan dialog terbuka dan refleksi kritis bersama; penyelenggaraan forum dialog antar-iman (interfaith dialogue) yang melibatkan tokoh-tokoh muda dari berbagai agama; kegiatan pengabdian masyarakat lintas agama seperti kerja bakti sosial, bakti sosial kesehatan, atau kampanye lingkungan; atau pengembangan media kreatif (video, podcast, majalah sekolah) yang merayakan dan mengampanyekan keberagaman Indonesia. Model ini selaras dengan framework Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi komponen inovatif dan khas dalam Kurikulum Merdeka

Model ketiga adalah Model Refleksi Teologis-Kewarganegaraan (Theological-Civic Reflection). Model ini mendorong peserta didik secara aktif dan kritis untuk merenungkan, mendialogkan, dan menemukan sendiri bagaimana ajaran-ajaran agama mereka berkorelasi secara organik dan saling menguatkan dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Melalui proses refleksi yang difasilitasi oleh guru secara terampil, peserta didik diharapkan sampai pada kesadaran autentik bahwa menjadi seorang muslim yang taat, yang sungguh-sungguh menghayati rahmatan lil 'alamin, dan menjadi warga negara Indonesia yang toleran, demokratis, serta berkomitmen pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah dua hal yang tidak hanya tidak bertentangan, tetapi saling mendukung dan bahkan saling memperkuat secara fundamental

e. Tantangan Sistemik dalam Implementasi

Meskipun secara normatif dan konseptual PAI dan PKn memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun kesadaran toleransi yang autentik dan berkelanjutan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan sistemik yang kompleks dan saling terkait, yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan pendidikan

Tantangan pertama dan paling fundamental adalah mindset dan kapasitas sebagian guru PAI yang masih memahami dan menjalankan perannya semata-mata sebagai penyampai materi ritual, ibadah, dan hafalan, bukan sebagai fasilitator pembentukan karakter yang holistik dan transformatif. Pemahaman yang sempit dan reduktif tentang PAI ini mengakibatkan nilai-nilai toleransi yang sebenarnya terkandung kaya di dalam tradisi Islam justru tidak tersampaikan kepada peserta didik secara efektif. Survei PPIM UIN Jakarta yang dikutip dalam (Syafuruddin dkk., t.t.) menemukan bahwa sekitar 37% guru PAI di tingkat SMP dan SMA memiliki pandangan yang kurang moderat tentang hubungan antar agama, yang tentu saja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap iklim pembelajaran PAI yang mereka ciptakan di kelas.

Tantangan kedua adalah rendahnya tingkat kolaborasi dan komunikasi profesional antara guru PAI dan guru PKn di sekolah. Kedua kelompok guru ini umumnya bekerja dalam silo-kurikuler yang terpisah dan hampir tidak pernah berinteraksi secara bermakna untuk tujuan pedagogis bersama. Padahal, justru dari sinergitas dan kolaborasi yang intensif antara keduanya



— dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi — potensi terbesar integrasi PAI-PKn dapat diwujudkan (Trisnawati dkk. 2021). Minimnya forum komunikasi profesional lintas mata pelajaran di tingkat sekolah dan kurangnya insentif institusional untuk kolaborasi semacam ini menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi secara sistemik.

Tantangan ketiga, yang semakin urgen di era hiperkonektivitas digital ini, adalah pengaruh masif konten digital dan media sosial yang seringkali menyebarkan narasi-narasi intoleransi, kebencian, radikalisme, dan hoaks keagamaan yang dapat secara efektif mengkonter dan merusak upaya-upaya pembentukan toleransi yang dilakukan di sekolah. Peserta didik menghabiskan rata-rata 7-9 jam sehari di depan layar digital, dan sebagian besar waktu itu digunakan untuk mengonsumsi konten di platform-platform media sosial yang algoritmanya cenderung menciptakan echo chamber dan memperkuat confirmation bias. Ini berarti bahwa selain membangun nilai toleransi, sekolah juga perlu mengembangkan literasi digital dan literasi media yang kritis pada peserta didik agar mereka mampu secara mandiri mengevaluasi dan memfilter konten digital yang mereka konsumsi

Tantangan keempat adalah kelemahan dalam sistem evaluasi pembelajaran. Sebagian besar sistem penilaian yang digunakan dalam PAI dan PKn masih terlalu berfokus pada dimensi kognitif (pengetahuan dan pemahaman) tentang konsep-konsep toleransi, sementara dimensi afektif (sikap dan nilai yang benar-benar terinternalisasi) dan dimensi perilaku (praktik toleransi dalam kehidupan nyata) jarang diukur secara sistematis dan komprehensif. Padahal, perubahan pada dimensi afektif dan perilaku inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan akhir dan indikator keberhasilan sejati dari pendidikan toleransi

f. Peluang Strategis: Kurikulum Merdeka dan P5

Di tengah berbagai tantangan yang nyata tersebut, terdapat sejumlah peluang strategis yang sangat menjanjikan dan perlu segera dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak yang berkepentingan. Implementasi Kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun ajaran 2022/2023 membawa serta beberapa inovasi kebijakan yang sangat relevan dan kondusif bagi pendidikan toleransi yang lebih efektif

Pertama, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan komponen kurikuler yang paling inovatif dan strategis dalam Kurikulum Merdeka. P5 memberikan alokasi waktu khusus (20-30% dari total jam pelajaran) yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran yang autentik dan bermakna. Tema-tema P5 seperti "Kebhinekaan Global", "Gaya Hidup Berkelanjutan", dan "Kewirausahaan" memberikan wadah ideal yang sangat relevan untuk mengimplementasikan model-model integrasi PAI-PKn dalam pembelajaran toleransi yang sesungguhnya, pembelajaran yang berdampak langsung pada kehidupan peserta didik dan komunitasnya.

Kedua, fleksibilitas kurikulum yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) memberi kebebasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengadaptasi, memodifikasi, dan memperkaya kurikulum nasional sesuai dengan konteks, kebutuhan, potensi, dan keunikan lokal masing-masing. Ini membuka ruang yang lebih lebar bagi inovasi pedagogis di tingkat sekolah, termasuk pengembangan unit-unit pembelajaran PAI-PKn yang terintegrasi dan kontekstual



Ketiga, momentum implementasi program Moderasi Beragama yang digalakkan secara nasional oleh Kementerian Agama RI, yang kini telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Perpres No. 58 Tahun 2023, memberikan dukungan kebijakan dan legitimasi institusional yang sangat dibutuhkan bagi penguatan pembelajaran toleransi dalam PAI. Program ini juga menyediakan berbagai sumber daya dan materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru PAI untuk memperkaya pembelajaran mereka.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang saling terhubung. Pertama, Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki landasan konseptual dan mandatori institusional yang sangat kuat untuk secara bersama-sama membangun kesadaran toleransi antar umat beragama di Indonesia. PAI menyediakan landasan teologis dan moral melalui nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, tasamuh, tawazun, dan moderasi beragama; sementara PKn menyediakan kerangka konstitusional dan demokratis melalui nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, hak asasi manusia, dan semangat kebhinekaan sebagai identitas kebangsaan. Kedua, efektivitas kedua mata pelajaran dalam membangun toleransi yang autentik sangat ditentukan oleh kualitas metodologi pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang dialogis, reflektif, kritis, kontekstual, dan berbasis proyek terbukti jauh lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi dibandingkan pendekatan konvensional yang bersifat satu arah, doktriner, dan hafalan. Guru yang memiliki kompetensi pedagogis yang tinggi, perspektif moderat yang kokoh, dan kemampuan untuk menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif adalah faktor kunci keberhasilan pendidikan toleransi. Ketiga, tiga model integrasi PAI-PKn yang teridentifikasi — Model Tematik Lintas Pelajaran, Model Proyek Sosial Kolaboratif, dan Model Refleksi Teologis-Kewarganegaraan — menawarkan strategi yang konkret, terstruktur, dan adaptable untuk memaksimalkan sinergi antara kedua mata pelajaran tersebut. Ketiganya dapat diimplementasikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas sekolah masing-masing. Keempat, berbagai tantangan sistemik yang ada — mulai dari mindset guru, minimnya kolaborasi antar guru, pengaruh narasi digital yang intoleran, hingga keterbatasan sistem evaluasi — memerlukan respons yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan: sekolah, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan secara spesifik: (1) Pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional development/CPD) yang komprehensif dan sistematis bagi guru PAI dan PKn, dengan fokus khusus pada internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, penguasaan metode pembelajaran dialogis dan berbasis proyek, serta pengembangan kompetensi literasi digital kritis; (2) Pembentukan komunitas belajar profesional (professional learning community/PLC) lintas mata pelajaran di setiap sekolah yang mempertemukan guru PAI dan guru PKn secara rutin untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran terpadu bertema toleransi; (3) Optimalisasi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) sebagai wadah utama integrasi PAI dan PKn dalam pembelajaran toleransi yang autentik, bermakna, dan berdampak



nyata bagi peserta didik dan komunitasnya; (4) Pengembangan sistem evaluasi pembelajaran yang komprehensif dan multidimensional — mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku — untuk mengukur perkembangan sikap dan praktik toleransi peserta didik secara holistik dan berkelanjutan, misalnya melalui portofolio, jurnal refleksi, dan observasi perilaku berbasis rubrik; dan (5) Penguatan ekosistem digital yang mendukung pendidikan toleransi, termasuk pengembangan konten digital edukatif bertema keberagaman dan moderasi beragama yang menarik, accessible, dan dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Penelitian lanjutan yang disarankan adalah studi eksperimental atau quasi-eksperimental yang secara langsung mengukur efektivitas komparatif ketiga model integrasi PAI-PK_n yang teridentifikasi dalam konteks sekolah yang beragam, serta studi longitudinal yang melacak perkembangan sikap toleransi peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas sebagai respons terhadap intervensi pendidikan toleransi yang terstruktur. Menurut Syamzaimar dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PK_n) memiliki peran penting dalam membangun kesadaran toleransi antarumat beragama. Pendidikan agama mengajarkan nilai moral, sikap saling menghormati, kasih sayang, dan hidup damai sesuai ajaran masing-masing agama. Sementara itu, PK_n menanamkan nilai persatuan, demokrasi, hak asasi manusia, serta sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui kedua pendidikan tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya hidup rukun, menghormati keberagaman, dan menjaga persatuan bangsa Indonesia meskipun memiliki perbedaan agama, budaya, dan suku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Abu. 2021. Telaah Kritis Atas Kompetensi Toleran Dalam Kurikulum Program Keagamaan Madrasah Aliyah.
- Chrisantina, Vita Santa. 2021. “Efektifitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah.” *Jurnal Edutraind : Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* 5 (2): 79–92. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v5i2.155>.
- Hanafie, Imam, Umar Fauzan, dan Noor Malihah. 2024. “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kerangka Berpikir Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran PAI Jenjang SMA pada Kurikulum Merdeka.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18 (2): 1106. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3390>.
- Hidayat, Amal Arifi, Vania Azalia Gunawan, Firda Rachmawati Iragama, dkk. 2023. “Risk factors and clinical characteristics of acute kidney injury in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis.” *Pathophysiology* 30 (2): 233–47.
- Huda, Miftachul. 2021. “Islamic philosophy and ethics of education: Al-Zarnūjī’s concept of Ta’zīm in his Ta’līm al-Muta’allim.” *Ulumuna* 25 (2): 399–421.
- Patih, Ahmad, Acep Nurulah, dan Firman Hamdani. t.t. *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*.
- Purnomo, Purnomo, dan Putri Irma Solikhah. 2021. “Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam



- Inklusif.” J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7 (2).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.
- Rabbani, Faqih Firmantara, Kiki Mohammad Iqbal, dan Opik Taupik. t.t. Pendidikan Islam Sebagai sebuah Sistem: Analisis Peran dan Tantangan di Era Globalisasi.
- Riyadi, Imam, Edo Arya Prabowo, dan Dzikiril Hakim. t.t. Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia.
- Rosyad, Ali Miftakhu, dan Affy Khoiriyah. 2025. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Systematical Literature Review. 5 (2).
- Sukandarman Sukandarman dan Ainur Rofiq Sofa. 2024. “Harmoni dalam Keberagaman: Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.” Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa 2 (4): 128–44.
<https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i4.1870>.
- Syafruddin, Didin, Ismatu Ropi, Yunita Faella Nisa, dkk. t.t. Hak Cipta© PPIM-UIN Jakarta Diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 2018.
- Syamzaimar. 2025. Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam. PT. Indragiri Dot Com.
- Trisnawati, Nika Fetria, Ruslan Hasyim, Mulyono Mulyono, Arie Anang Setyo, dan M. Fathurrahman Fathurrahman. 2021. “The Effectiveness of Mathematics Learning Using Scientific Approaches Assisted by Powerpoint Media.” Mathematics Education Journal 5 (1).
- Widiyanto, Delfiyan, dan Annisa Istiqomah. 2023. “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi.” Jurnal Pendidikan 32 (1): 1–10.
<https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>.
- Widodo, D. Setyo, dan Andri Yandi. 2022. “Model kinerja karyawan: kompetensi, kompensasi dan motivasi,(Literature Review MSDM).” Jurnal Ilmu Multidisplin 1 (1): 1–14.
- Yani, Muhammad Turhan, Mufarrihul Hazin, dan Yusuf Hanafi. 2023. “Insertion Model of Religious Moderation and National Defence as Efforts to Prevent Radicalism and Communism via Islamic Religious Education Instructions.” Arts Educa 36.